

**DINAMIKA KETERPILIHAN KADER PARTAI GOLKAR DI DPRD
KOTA PAREPARE (PERBANDINGAN HASIL PEMILU LEGISLATIF
2009 & 2014)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh :

KHAIDIR ALIF

NIM: 30600112020

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwas kripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata, 30 Maret 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KHAIDIR ALIF

NIM. 30600112020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Dinamika Keterpilihan Kader Partai Golkar Di DPRD Kota Parepare (Perbandingan Hasil Pemilu Legislatif 2009&2014),” yang disusun oleh Khaidir Alif, NIM: 30600112020, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 M, bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Maret 2017 M.

2 Jumadil Akhir 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Abdullah, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Darmawati H., M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Nur Aliyah Zainal, S.IP., MA	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Muh Natsir, M.A.

NIP.19590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena dengan hidayah serta ijinnyalah, sehingga skripsi yang berjudul “*Dinamika Keterpilihan Kader Partai GOLKAR di DPRD Kota Pare-Pare (Perbandingan Hasil Pemilu Legislatif 2009 dan 2014)*” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, atas jasa dan pengabdianya yang tulus dalam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada umat manusia.

Sebelumnya Ucapan banyak terima kasih kepada orangtua penulis dengan bangga kepada Ayahanda H.Kasransyah taha.S.SOS, M.M yang selalu jadi panutan serta memberikan pesan serta motivasi dan tidak pernah lelah berusaha demi memenuhi keinginan penulisan Ibunda Hj. Najmah yanti S.SOS yang selalu jadi pendengar tiap keluh kesah dan membimbing serta menjaga dengan sabar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari., M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin dan Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir. M.Ag. selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, Dan Politik UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si, sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D. sebagai sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
4. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si sebagai penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ramli, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP., MA Sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang tidak disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-Saudaraku serta Om Ipar beserta keluarga yang selalu membantu penulis baik itu secara akademik maupun secara materi.
9. Rekan-rekan mahasiswa, terutama paramahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2012. khususnya JJM yaitu Sri Sumarni, Siti Nurhaedah (Nanna),

Muh. Ibnu Rusyd, Eko Rachmat, Syahril Ali, M. Asnawi, dan Irfan M yang senantiasa memberi saran serta mendengarkan segala curhatan dan memberikan motivasi kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi dukungan Ezra, Riandani wijayanto, Ajis ,Nino, Achyar, Ari Guntur dan Ulfa Anggriani hasan yang telah bersedia menemani dan banyak menghibur serta memberikan semangat kepada penulis.

11. Kawan-kawan IKMP (Ikatan Keluarga mahasiswa Parepare) Khususnya MPO yang sama-sama menjabat Angkatan 2012 yang sampai sekarang masih tetap solid dan memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Amin.

Samata, 28Maret 2017

Penyusun

KHAIDIR ALIF
NIM.30600112007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Karya Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	17
1. Teori Partai Politik	17
2. Teori Pendekatan Perilaku.....	20
3. Teori Sistem Pemilihan umum	23
4. Teori Kekuasaan.....	28
5. Teori Elite Politik	29
C. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31

2. Waktu dan lokasi penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan data dan analisis data.....	31
a. Teknik pengumpulan data	31
b. Teknik analisa data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Kota Parepare.....	36
2. Visi-Misi Kota Parepare	37
3. Pemerintahan	38
B. Peran Partai Golkar Kota Parepare dalam meningkatkan kuantitas & keterpilihan anggota partai di pemilu legislative periode 2009 dan 2014.....	41
1. Fungsi partai politik (Partai Golkar).....	41
2. Program Partai Golkar DPD II di Kota Parepare	42
3. Memfasilitasi pendidikan politik untuk prestasi kader	45
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan kader Partai Golkar di DPRD Kota Parepare pada PEMILU Legislatif periode 2009 dan 2014	52
1. Aktor politik & Kekuasaan.....	52
2. Faktor Jaringan dan system Pemilihan Umum	53
3. Faktor Sosialisasi, ekonomi, hubungan emosional dan pentingnya pengawasan dalam Pemilu legislatif	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63

B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73



ABSTRAK

Nama : Khaidir Alif

Nim : 30600112020

Jurusan : Ilmu Politik

**Judul : "Dinamika Keterpilihan Kader Partai Golkar di DPRD Kota Parepare
(Perbandingan Hasil Pemilu Legislatif 2009-2014)"**

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Dinamika keterpilihan kader partai Golkar di DPRD Kota Parepare. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran partai Golkar dalam meningkatkan Kuantitas keterpilihan anggota partai di pemilu legislatif dan faktor yang mempengaruhi keterpilihan kader partai Golkar di DPRD Kota Parepare pada pemilu legislatif Periode 2009 dan 2014.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepartaian teori Pendekatan dan teori Demokrasi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kuantitas Kader Partai Golkar mengalami pengurangan Kursi dari periode 2009-2014 ke periode 2014-2019 hal ini disebabkan kurangnya suara yang di peroleh oleh setiap calon yang di usung oleh Partai Golkar dan beberapa kemungkinan di akibatkan oleh sistem Pemilu yang tidak berjalan dengan harapan partai golkar yang bisa memberi kesempatan bagi partai-partai kecil untuk mengambil keuntungan kecil dari kursi DPRD yang di sediakan. yang dimanah hasil analsis melalui angka perolehan suara bulat yang harus diperoleh untuk mendapatkan satu Kursidi DPRD. Peran partai Golkar dalam meningkatkan elektabilitasnya sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat ke setiap kader yang di calonkan, maka bentuk strategi dalam mencapai kepercayaan masyarakat partai golkar tentunya sering melakukan program yang menyentuh hati masyarakat Kota parepare, misalnya melakukan sosialisasi politik (pendidikan politik), bakti sosia (Baksos), dan seringkali kader melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam pengurusan administrasi di kantor instansi pemerintahan. Partai Golkar beserta kadernya tentu telah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan elektabilitasnya dan berusaha agar meningkatkan kuantitasnya di kursi pemerintahan akan tetapi itu tdk lepas dari peran partisipasi masyarakat dalam memilih dan sisitem Pemilu yang di gunakan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Golongan Karya (Golkar) yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 yang tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman. Dengan doktrin karya kekaryaan maka Partai Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.

Dengan doktrin karya kekaryaan Partai Golkar berorientasi pada program (*program oriented*) dan atau pemecahan masalah (*problem solving*), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (*ideology oriented*). Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa Golkar tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan malah disintegrasi bangsa.¹

Dengan Orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang membangun bangsa. Bagi Partai Golkar karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan

¹ Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: Golkar Press, 2003) hal. 67

secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaan adalah juga amal shaleh dalam pengertian yang luas.

Amal Shaleh dengan demikian adalah amal (karya) yang baik yang bermanfaat bagi seluruh rakyat dan kemanusiaan yang dilakukan secara ikhlas tetapi terencana, sistematis, dan menyeluruh. Doktrin karya kekaryaan ini lahir karena didorong oleh keprihatinan Partai Golkar menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat di antara berbagai partai politik yang mengakibatkan terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecenderungan tersebut, bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi.

Euphoria untuk menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dan menekankan ideologi politik yang sektarianistik, seperti pada pengalaman lama itu, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. Sebagai akibatnya rakyat terjerebab kedalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam suasana ketidakpastian politik. Dalam suasana seperti itulah Partai Golkar tampil dengan doktrin karya kekaryaan karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.²

² Akbar Tandjung, *Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional*, (Jakarta: Golkar Press, 2003) hal. 68-69

Terkait dengan hal tersebut, Allah SWT melalui firmanNya dalam surah(Q.S.Ali-Imran: 3:159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Q.S.Ali-Imran 3:159)”³

Harus diakui, bahwa hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena ternyata wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD, belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang diwakilinya dan juga belum mampu meningkatkan hartat dan martabat bangsa di mata dunia Internasional. Mereka sangat lamban merespon masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat dan dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang ,sering berlarut –larut karena terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang diwarnai oleh kepentingan pribadi dan

³ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Surah Ali-Imran Ayat 159 . Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2006.hal.

golongan. Undang-undang yang dihasilkan sering tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Salah satu kemungkinan besar dari masalah di atas adalah seorang kader parpol masuk daftar calon bukan karena kualitasnya, tetapi berdasarkan berapa banyak kontribusi yang dapat diberikan kepada partai, dan biasanya hal ini dalam bentuk uang.

Mengingat pemilu kita masih menggunakan “Nomor Urut” sebagai salah satu cara untuk menentukan calon terpilih, sehingga kader-kader tertentu tidak segan-segan mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut, yang mempunyai peluang terbesar untuk terpilih. Tidak perlu ditutup-tutupi, kenyataan ini terjadi hampir di semua parpol peserta pemilu, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana, guna membiayai kegiatan parpol. Hal ini pulalah yang menyebabkan masih adanya parpol yang ingin mempertahankan sistem nomor urut, sebagai salah satu cara untuk menentukan calon terpilih. Pada hal kita menyadari, bahwa penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut tersebut, dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi, dalam pemilu yang ingin mengembalikan sepenuhnya kedaulatan ke tangan rakyat dan juga akan berakibat seorang anggota dewan lebih merasa dirinya sebagai wakil parpol, daripada sebagai wakil rakyat, untuk mewujudkan kader partai yang lebih berkualitas di masa depan, maka parpol harus mampu menempatkan para kadernya dalam daftar calon berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan pertimbangan lain, terutama yang berkaitan dengan uang.

Parpol berperan penting dalam mengefektifkan peran dan fungsi anggota DPRD sebagaimana dijelaskan bahwa Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ikut

ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil ia mungkin mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu. suatu partai konservatif dan tradisional, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu hanya berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.⁴

Oleh karena itu, dalam Q.S.Al-Nisa/4: 58-59 telah mengajarkan tentang dasar-dasar pemerintahan, perintah menunaikan amanah, menegakkan keadilan, dan kembali kepada Allah, Rasul-Nya dan ulil amri dalam setiap masalah. Ayat tersebut berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.*⁵

Kepengurusan Partai Golkar Kota Pare-pare yang dipimpin oleh bapak Dr. Taufan Pawe S.H.,M.H adalah pengurusan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah

⁴ A.Rahman H.I. *Sistem politik indonesia*.(Jakarta: graha ilmu . 2007). hal.103

⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Surah An-nisa: Ayat 58-59. Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2006.hal.

Luar Biasa pada tanggal 30 Mei 2013 yang merupakan pengisian jabatan antar waktu dengan masa bhakti 2009-2015. Dengan demikian ketua DPD II Partai Golkar pada saat partai ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun.

Ketika awal memimpin Partai Golkar iklim dalam partai ini tidak kondusif. Sebagian besar pengurus partai di semua tingkatan masih dalam bayang-bayang mantan Ketua DPD II Partai Golkar yang lama yaitu bapak H.M. Zain Katoe. Keadaan ini sangat rawan dan mengancam keutuhan Partai Golkar, dimana pada saat itu kita sedang menghadapi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan digelar pada tanggal 29 agustus 2013 yang tahapannya dimulai pada bulan juni 2013. Salahsatu calon pesaing pada PILKADA tersebut adalah Putra Bapak H.M Zain Katoe. Inilah pekerjaan awal yang sangat berat kami hadapi. Dalam menghadapi kondisi ini dibutuhkan sebuah kepemimpinan yang arif dan bijaksana, sikap yang harus bisa merangkul semua pihak agar ikut bersama-sama berjuang untuk memenangkan perhelatan PILKADA tersebut.

Partai Golkar akhirnya memenangkan pertarungan politik yang diikuti oleh 5 (lima) pasang calon dapat di menangkan dengan presentase 40,26%. Ini adalah awal perolehan presentasi kepemimpinan di Golkar Parepare.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat sebuah judul skripsi “Dinamika Keterpilihan Kader Partai Golkar di DPRD Kota Pare-Pare (Perbandingan Hasil Pemilu Legislatif 2009 dan 2014)”

⁶ Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare. Hal.2

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tingkat keterpilihan kader Partai Golkar di DPRD Kota Parepare perbandingan periode 2009 dan 2014 pada khususnya

C. RUMUSAN MASALAH

Agar penulis dalam menyusun skripsi, tidak keluar dari pokok masalah dari judul yang telah disepakati, maka penulis akan merumuskan masalah dengan mengkaji dari segi

1. Bagaimana peran Partai Golkar Kota Parepare dalam meningkatkan kuantitas keterpilihan anggota Partai di Pemilu Legislatif periode 2009 dan 2014?
2. Bagaimana pengaruh keterpilihan Kader Partai Golkar di DPRD Kota Parepare pada Pemilu Legislatif Periode 2009 dan 2014?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Partai Golkar Kota Parepare dalam meningkatkan kuantitas keterpilihan anggota Partai di Pemilu Legislatif periode 2009 dan 2014
2. Untuk memberikan informasi dan data kepada peneliti yang berminat untuk mengembangkan lebih jauh penelitian yang sama dengan ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Agar pembaca lebih memahami kondisi yang terjadi di DPRD Kota Parepare, sehingga dapat memberikan masukan terhadap Partai Golkar demi meningkatkan kuantitasnya di DPRD Kota Pare-Pare.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi setiap anggota DPRD Kota Parepare dan masyarakat Parepare pada khususnya untuk dijadikan rujukan dalam mengoreksi kinerjanya, sehingga termotivasi untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi setiap individu caleg untuk mempersiapkan diri pada saat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Parepare periode berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Karya Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, diterjemahkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema.

1. Sebagaimana penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Suhardiman yang berjudul *“Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)”* hasil penelitian Sistem kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sistem kaderisasi Partai Golkar antar lain adalah memberikan pelatihan bagi kader sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia. Didukung nilai manfaat yang dapat diambil dari pendidikan dan pelatihan yaitu dapat menunjang kelancaran tugas partai. Karena kader yang pernah mengikuti pelatihan akan memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian serta kecakapan untuk menjalankan tugas-tugas serta tanggung jawab yang diberikan partai politik sebagai salah satu kualifikasi yang dimiliki seorang kader. Dalam perspektif partai, kompetensi dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab untuk mengaktualisasikan kebijakan untuk mengemban misi partai menuju pencapaian tujuan dan cita-cita yang harus dimiliki kader Partai Golkar.⁷

⁷ Suhardiman, Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara), Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda 2015. Sebuah *skripsi*.

2. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Alfianti Rahman yang berjudul *“Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018”* penelitian ini membahas tentang Partai Golkar Bone menjadi incaran enam orang kandidat Bupati. Keenam kandidat tersebut adalah, Andi Mangunsidi Massarapi, Andi Fahzar M. Padjalangi, Andi Irsan Idris Galigo, Andi Sultan Pawi, Andi Syamsiar Rosalim, dan Ambo Dalle. A Fahsar Padjalangi adalah salah satu orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon Bupati Bone dari Partai Golkar, yang dalam perjalanannya kemudian ditetapkan sebagai calon bupati di pilkada Bone. Penetapan calon bupati tersebut digelar pada rapat pleno DPP Partai Golkar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana proses pengambilan keputusan penentuan calon bupati Partai Golkar di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penentuan dilakukan, ada proses yang disebut penjaringan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada kabupaten, merekrut semua bakal calon yang potensial. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan. Penetapan A. Fahsar ini didasarkan pada keputusan DPP Partai Golkar yang berpatokan pada hasil survei dari lembaga survei yang telah ditunjuk. Selain itu

pertimbangan lain juga didasarkan pada kemauan masyarakat dan kecakapan calon yang bersangkutan.⁸

3. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Irvan Ansyari yang berjudul *“Analisis Kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999”* Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar dianggap sebagai sebuah kajian yang menarik, bagaimana tidak, di daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam adat-istiadatnya, Partai Golkar menunjukkan politik aliran tidak berlaku di Kabupaten Tanah Datar dan Partai-partai Islam maupun partai lain yang kerap bergantian menjadi pemenang secara Nasional seolah tidak bisa berputik dari dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dapat dilihat melalui variabel pemilihan kepala daerah (Bupati), perolehan suara Golkar di DPRD serta kekuasaan Partai Golkar yang membentuk jaringan hingga tingkat Nagari di Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan purposive sampling melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan-informan terpilih agar data yang diperoleh relevan dengan rancangan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dan jaringan Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar menembus hingga struktur pemerintah terendah setingkat Nagari, mulai dari Bupati Kabupaten Tanah Datar, lembaga

⁸ Alfianti Rahman, *Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018*, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013, sebuah *skripsi*.

adat dan tokoh-tokohnya, tokoh agama, pengusaha, budayawan hingga Wali Nagari. Jaringan ini menjadi kunci dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Keberadaan tokoh-tokoh inilah yang membuat adanya hubungan patron klien antara kader-kader Golkar yang tersebar diseluruh pelosok Nagari dengan masyarakat pendukung Partai Golkar, penduduk Kabupaten Tanah Datar yang mayoritas memang kalangan petani yang merupakan pemilih tradisional ikut menjadi faktor dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Kader-kader Golkar ini dianggap mampu memberikan jaminan sosial dan rasa aman kepada masyarakat setempat sehingga menarik simpati masyarakat untuk memilih Golkar.⁹

4. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Roni Tamara Saputra yang berjudul *“Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses sistem kaderisasi, proses penetapan calon anggota legislatif, pertimbangan Partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif dari orang yang bukan dari kader Partai Golkar, dan strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar agar kader-kadernya tidak pindah ke partai lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009 menggunakan sistem Bottom Up (usulan dari bawah) dengan metode

⁹ Irvan Ansyari, Analisis Kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999, Universitas Diponegoro, Semarang 2014. Sebuah *skripsi*.

diskusi dan penyajian materi serta mengedepankan kader-kader dari tingkat desa atau yang lebih dikenal sebagai Karakterdes (Kaderisasi Tingkat Desa). Proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara pada pemilu 2009 menggunakan sistem tertutup, dimana dalam proses pengambilan keputusan, Ketua DPD Partai Golkar membentuk tim yang ditugaskan untuk menyeleksi kembali kandidat yang akan diusung oleh partai untuk menjadi calon legislatif melalui rapat Pleno. Partai Golkar dalam pemilu 2009 tidak menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar. Adapun yang menjadi bahan Pertimbangan Partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Partai Golkar seperti pada saat pemilu 2004 dan pemilu 2014 adalah dengan memberi pertimbangan beberapa aspek, seperti aspek finansial dan ketokohnya. Strategi Partai Golkar dalam menjaga kader partai agar tidak pindah ke partai lainnya pada periode 2004-2009 dengan melibatkan pengurus-pengurus di tingkat desa dalam kegiatan-kegiatan partai agar selalu menjaga silaturahmi dan mempererat rasa kebersamaan antar setiap kader dari pengurus desa sampai pengurus kabupaten Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.¹⁰

5. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Asmadianto yang berjudul “*Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada*

¹⁰ Roni Tamara Saputra, Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara), Universitas Mulawarman, Samarinda 2014, sebuah *skripsi*.

di Sulawesi Barat 2014)”metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan studi kasus (*case studies*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu mengamati kondisi obyektif dilapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam konflik internal DPD I Partai Golkar dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penyebab terjadinya konflik adalah akibat dilakukannya penonaktifan ketua DPD I Golkar oleh pengurus DPP yang melibatkan aksi protes sejumlah kader didaerah atas pemecatan itu. Kedua, kehadiran Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (Plt) semakin memperpanas embrio konflik di Internal Partai. Ketiga, akibat dilakukannya pemecatan oleh pengurus DPP kepada Anwar membuat sebagian pengurus DPD lainnya ikut menyoroti dan memperpanas konflik karena menganggap pengurus pusat tidak mempertimbangkan akibat dari pemecatan tersebut keempat, perpecahan yang terjadi di internal Golkar Sulbar sangat berdampak pada elektabilitas kader dalam pencalonan kepala daerah dikarenakan kesibukan dalam menengarahi konflik Golkar, sehingga di beberapa daerah kabupaten memaksa pengurus melakukan penjaringan figur untuk memenangkan Pilkada. Bahkan tidak tanggung-tanggung memaksa Partai Golkar berkoalisi pada partai pengusung bakal Calon di salah satu kabupaten di Sulbar.¹¹

¹¹ Asmadio, Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

NO	NAMA	JUDUL	MASALAH	METODE	HASIL
1	SUHADIRMAN	<i>Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)</i>	Bagaimanakah sistem kaderisasi dan penetapan calon anggota legislatif Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara	Menggunakan jenis data deskriptif dengan Teknik wawancara dan observasi	memberikan pelatihan bagi kader sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia. Didukung nilai manfaat yang dapat diambil dari pendidikan dan pelatihan yaitu dapat menunjang kelancaran tugas partai.
2	Alfianti Rahman	<i>Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018</i>	bagaimana proses pengambilan keputusan penentuan calon bupati Partai Golkar di Kabupaten Bone periode 2013-2018	Menggunakan jenis data deskriptif dengan Teknik wawancara dan observasi	penelitian menunjukkan bahwa sebelum penentuan dilakukan, ada proses yang disebut penjangkaran, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada kabupaten, merekrut semua bakal calon yang potensial
3	Irvan Ansyari	<i>Analisis Kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999</i>	Apakah Pengaruh Kemenangan Kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999	Menggunakan jenis data deskriptif dengan Teknik wawancara dan observasi	pengaruh dan jaringan Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar menembus hingga struktur pemerintah terendah setingkat Nagari, mulai dari Bupati Kabupaten Tanah Datar, lembaga adat dan tokoh-tokohnya, tokoh agama, pengusaha,

					budayaawan hingga Wali Nagari
4	Roni Tamara Saputra	<i>Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)</i>	Bagaimana sosial kaderisasi dan penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009	Menggunakan jenis data deskriptif dengan Teknik wawancara dan observasi	sosial kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009 menggunakan sosial Bottom Up (usulan dari bawah) dengan metode diskusi dan penyajian materi serta mengedepankan kader-kader dari tingkat desa atau yang lebih dikenal sebagai Karakterdes (Kaderisasi Tingkat Desa)
5	Asmadianto	<i>Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014)</i>	Apakah penyebab terjadinya Konflik Internal dan Rekrutmen Politik Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014	Menggunakan jenis data deskriptif dengan Teknik wawancara dan observasi	pertama, penyebab terjadinya konflik adalah akibat dilakukannya penonaktifan ketua DPD I Golkar oleh pengurus DPP yang melibatkan aksi protes sejumlah kader didaerah atas pemecatan itu. Kedua, kehadiran Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (Plt) semakin memperpanas embrio konflik di Internal Partai. Ketiga, akibat dilakukannya pemecatan oleh pengurus DPP kepada Anwar membuat sebagian pengurus DPD lainnya ikut menyoroti dan memperpanas konflik karena menganggap pengurus pusat tidak mempertimbangkan akibat dari pemecatan

					tersebut keempat, perpecahan yang terjadi di internal Golkar Sulbar sangat berdampak pada elektabilitas kader dalam pencalonan kepala daerah dikarenakan kesibukan dalam menengarahi konflik Golkar, sehingga di beberapa daerah kabupaten memaksa pengurus melakukan penjurangan ocial untuk memenangkan Pilkada
--	--	--	--	--	---

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Partai Politik

Carl friedrich memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.¹²

a. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Grasindo,1992).hal.116

paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis).¹³

b. Sosialisasi Politik

Pelaksanaan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

c. Rekrutmen Politik

Adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Grasindo,1992).hal.117

kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.¹⁴

d. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum dan mendukung atau menantang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

e. Pemadu Kepentingan

Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. itulah yang dimaksud dengan fungsi pemaduan kepentingan.¹⁵

f. Komunikasi Politik

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Grasindo,1992).hal.118

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Grasindo,1992).hal.119

Adalah Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah . Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

g. Kontrol Politik

Ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif.¹⁶

2. Teori Pendekatan Perilaku

Pemikiran Talcott Parsons mengenai pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku (*behavior*) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Grasindo,1992).hal.121

kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional, atau masyarakat politik (*polity*).

Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga politik sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Jika penganut pendekatan perilaku mempelajari perlemen, maka yang di bahas antara lain perilaku anggota perlemen seperti pola pemberian suaranya (*Voting Behavior*) terhadap rancangan undang-undang tertentu (apakah pro atau anti dan mengapa demikian), pidato-pidatonya, giat-tidaknya memprakarsai rancangan undang-undang, cara berinteraksi dengan teman sejawat, kegiatan *lobbying*, dan latar belakang sosialnya.

Pada umumnya meneliti tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner. Ia tidak saja mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti budaya, sosiologis, dan psikologis.

Pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri khas yang revolusioner yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David Easton (1962) dan Alber Somit (1967), diuraikan sebagai berikut;

Perilaku politik menampilkan keteraturan (*regularities*) yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang kemudian dibuktikan atau

diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur

Harus ada usaha membedakan secara jelas antara norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan fakta (sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman).

- a. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi si peneliti; setiap analisis harus bebas-nilai (*value-free*), sebab benar/tidaknya nilai-nilai seperti misalnya demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak dapat diukur secara ilmiah.
- b. Peneliti harus sistematis dan menuju pemebentukan teori (*theory building*).
- c. Ilmu politik harus bersifat murni (*pure science*); kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solving*) dan menyusun rencana perbaikan perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya.

Para *structural-functionalists* berpendapat bahwa, sekalipun berbagai sistem politik berbeda satu sama lain dalam cara mengatur institusi, tetapi ada fungsi-fungsi tertentu yang diselenggarakan dalam setiap sistem politik. Hal ini memudahkan para peneliti untuk juga mempelajari kegiatan dan kehidupan politik di negara-negara berkembang yang masing-masing berbeda sejarah perkembangan, latar belakang kebudayaan, dan ideologinya. Pengamatan dilakukan terhadap bermacam-macam struktur yang menjalankan fungsi-fungsi yang sama, sekalipun nama struktur itu mungkin berbeda. Kecenderungan ini telah mempertajam penelitian mengenai politik

di negara-negara baru dan dengan demikian telah memajukan bidang studi perbandingan politik (*comparative politics*).¹⁷

3. Teori Sistem Pemilihan Umum

Menurut R. William Liddle yang menyatakan. Dalam sistem demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.¹⁸

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a) Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut sistem Distrik).
- b) Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem Perwakilan Berimbang atau sistem Proporsional).¹⁹

¹⁷ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia utama. 2008). hal. 74-78

¹⁸ Indra J. Piliang. *Mengenal Teori-teori Politik dari sistem politik sampai korupsi*. (Bandung: Penerbit Nuansa. 2006). hal. 298

¹⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia utama. 2008). hal. 461

Keuntungan dan Kelemahan Kedua Sistem

A. Distrik

1. Keuntungan sistem distrik

- a. Sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap pemilihan hanya distrik hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui *stembus accord*.
- b. Fregmentasi partai dan kecenderungan memebentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong kearah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
- c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula kedudukan terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai.
- d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemili-pemilih lain, sehigga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.

- e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.
- f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

2. Kelemahan Sistem Distrik

- a. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik
- b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika partai banyak mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.
- c. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan *tribal*, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.
- d. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distrik, daripada kepentingan nasional.

B. Proporsional

1) Keuntungan Sistem Proporsional

- a. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum.
- b. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih *egalitarian* karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, tanpa suara yang hilang atau *wasted*. Akibat, semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil pun, memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Rasa keadilan (*sence of justice*) masyarakat sedikit banyak terpenuhi.
- c. Sebagai contoh Di Indonesia persentase perolehan kursi kira-kira sama dengan persentase perolehan suara secara nasional.

2) Kelemahan Sistem Proporsional

- a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai.
- b. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai, anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu

untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilihan umum. Jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai.

- c. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem Daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon.
- d. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar (bisa sebesar provinsi), sehingga sukar dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang. Dengan demikian si wakil akan lebih terdorong untuk memerhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum ketimbang kepentingan distrik serta warganya.
- e. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas (50% + satu) dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan. Partai yang terbesar terpaksa berkoalisi dengan beberapa partai lain untuk memperoleh mayoritas. Koalisi semacam ini jika diselenggarakan dalam sistem parlementer sering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial perubahan dalam komposisi di parlemen tidak terlalu memengaruhi masa jabatan eksekutif. Di Amerika bisa saja *Congress* mengalami perubahan dalam komposisinya, sehingga misalnya badan itu

dikuasai oleh Partai Demokrat, tetapi presiden serta kabinetnya dari Partai Republik tetap bertahan selama empat tahun.²⁰

4 Teori Kekuasaan

Menurut Robert Dahl, A dikatakan memiliki kekuasaan atau B apabila A dapat mempengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Maksudnya, apabila A mempengaruhi B untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak B maka hubungan ini tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan. Yang menjadi persoalan dalam rumusan Dahl, bagaimana kita dapat mengetahui secara empiris, apakah perilaku yang dipengaruhi itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Sebab dapat saja suatu negara menyatakan tindakannya sesuai dengan politik luar negeri negara lain (yang mempengaruhi) yang berlansung atas kehendak bebas negara itu sendiri. Padahal dalam kenyataan tindakan itu justru sebagai akibat pengaruh dari negara lain yang kurang diketahui umum. Namun, yang menarik dari rumusan Dahl ialah batasannya yang tajam, dan karena itu berlingkup sempit. Dalam hal ini, membuat pihak lain berperilaku yang bertentangan dengan kehendaknya justru memerlukan kemampuan menggunakan sarana kekuasaan secara efektif.

Rumusan lain yang muncul disini menyatakan A mempunyai kekuasaan atas B apabila dia dapat mempengaruhi B untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (A). Namun, rumusan inipun menimbulkan persoalan mengenai apakah seseorang atau suatu negara dapat dikatakan mempunyai kekuasaan

²⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia utama. 2008). hal. 467-469

setiap kali kehendak (tujuannya) terpenuhi? Untuk mengatasi hal ini, dikemukakan setiap hubungan kekuasaan harus memenuhi dua persyaratan, yakni tindakan itu dilaksanakan baik oleh yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi, dan terdapat kontak atau komunikasi antara keduanya baik langsung maupun tidak langsung.²¹

5 Teori Elit Politik

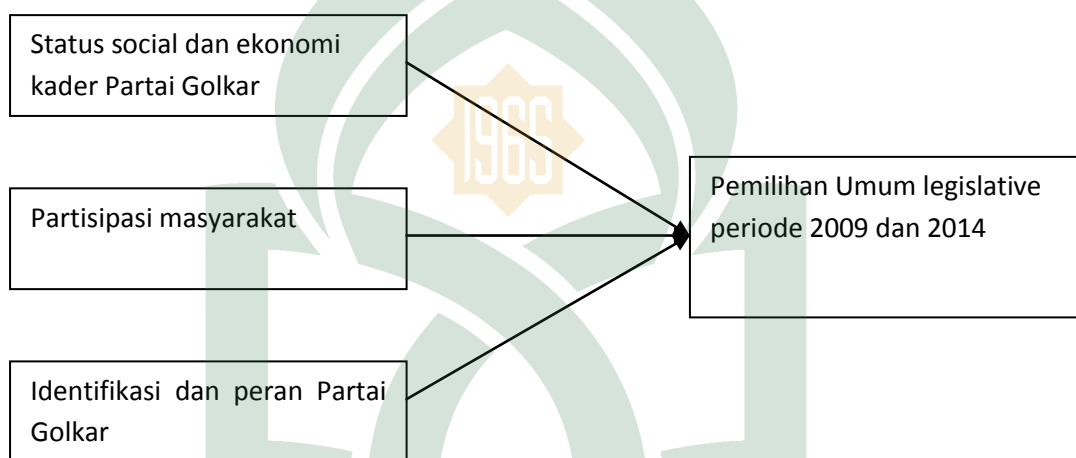
Menurut Pareto percaya bahwa setiap masyarakat di perintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non- elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia berkuasa

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Grasindo,1992).hal.57

karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.²²

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Tabel 2.1
Kerangka Konseptual



²² SP. VARMA, Teori Politik Moderen.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010).hal.200

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. Penelitian kualitatif deskriptif dibagi dalam dua hal. pertama, penelitian kualitatif deskriptif “*unmeaning*” hanya untuk memaparkan bagian permukaan dari sebuah realitas empiris. Kedua, penelitian kualitatif deskriptif “*meaningful*” yakni penelitian deskriptif yang selain mengungkap permukaan luar dari sebuah realitas sosial, tapi juga hingga bagian dalam.²³

2. Waktu dan lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2016 akan datang, waktu pelaksanaannya kurang lebih dua bulan dan tempat lokasi penelitian berada di Gedung DPD II Partai Golkar Kota Parepare terlebih dahulu .

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis data

²³ Mukhtar .*Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif. Referensi*(Jakarta Selatan:GP Press Group.2013). hal.29-30.

A. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Yaitu dengan mengamati kegiatan dan tanggapan dari setiap kader DPRD Kota Parepare utamanya di Gedung DPD II Partai Golkar Kota Parepare. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.²⁴

b. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum

²⁴Morissa, M.A. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta :Kencana, 2012). hal.117 -118.

dilaksanakan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Kader Partai Golkar di DPRD kota Parepare Periode 2009 dan 2014 yaitu: periode 2009 berjumlah 6 orang yang pernah menjabat dan periode 2014 berjumlah 5 orang yang sedang menjabat di Kota Parepare.
- Pengamat Politik yang berada di Kota parepare : berjumlah 3 orang.
- Masyarakat Pro Partai Golkar : berjumlah 8 orang dari 4 kecamatan.
- Masyarakat Kontra Partai Golkar : berjumlah 8 orang dari 4 kecamatan.
- Ketua KPU kota Parepare.
- Kader Partai Golkar Kota Parepare

c. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

B. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan meneliti bagian-bagiannya serta hubungan dari bagian-bagian itu. Proses ini berlangsung bertahap yakni pengkajian literatur atau pengamatan pada fenomena, kategorisasi, menelusuri kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, menarik kesimpulan, serta membangun teori.²⁵

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelempokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:²⁶

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dengan masalah penelitian.

²⁵ Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Hal.192

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, Hal.162

- c. Penyajian data setelah data reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penulisan dan hasil observasi
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan.

Kedua data tersebut, akan dianalisis secara kualitatif, kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan misalnya untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai dinamika keterpilihan kader Partai Golkar di DPRD Kota Parepare

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare berada pada posisi antara 03O57'39" – 04O04'49" Lintang Selatan dan 119O36'24" – 119O34'40" Bujur Timur dan secara administrasi wilayah Kota Parepare memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar Wilayah administrasi Kota

Parepare hingga tahun 2008 terdiri atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Luas wilayah dari masing-masing kecamatan Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 66,70 Km², atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 Km² atau sekitar 8,38 % dari luas Kota Parepare. Secara terperinci luas dari masing-masing kecamatan di Kota Parepare IKLIM Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5oC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC. Kota Parepare beriklim tropis

dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. WAKTU Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan 8 jam lebih cepat dari Greenwich Meridian Time (GMT).²⁷

Tabel kependudukan kota Parepare pada tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kependudukan Kota Parepare

Kecamatan	2014				
	Luas (km2)		Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
	Luas Wilayah	Persentase	Penduduk	Persentase	
Bacukiki					
Bacukiki Barat	66.70	67.15	16 753	12.24	251
Ujung	13	13.09	41 697	30.46	3 207
Soreang	11.30	11.38	33 684	24.60	2 981
Parepare	8.33	8.38	44 769	32.70	5 374
	99.33	100	136 903	100	1 378

Sumber: BPS Parepare 2014

2. Visi - Misi Kota Parepare

Visi misi Kota Pare Pare 2013-2018 sesuai PERDA Nomor 12 Tahun 2014

Tentang RPJMD Kota Pare Pare 2013-2018

VISI

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2015. (Parepare municipality in figures, 2015) hal.1

Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat

MISI

1. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup.
4. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
5. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budayaa lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.²⁸

3. Pemerintahan

Kota parepare terdiri 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Empat kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bacukiki, Bacukiki barat, Ujung dan Soreang. Seluruh kelurahan di Kota Parepare termasuk dalam klasifikasi Kelurahan Swasembada. Keanggotan DPRD Kota Parepare terdiri dari 25 orang yang berasal dari 11 partai/6 fraksi. Tahun 2014 DPRD Kota Parepare menghasilkan 50 Keputusan (meliputi 14 Keputusan PERDA, 33 Keputusan DPRD, dan 3 Keputusan Pimpinan DPRD).

²⁸ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2015. (Parepare municipality in figures, 2015) hal.2

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Pemda Kota Parepare berjumlah 4.649 orang, terdiri dari 1.973 orang PNS laki-laki dan 2.675 orang PNS perempuan. Jika dilihat berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan jauh lebih besar dibanding pegawai laki-laki. Fenomena ini dikarenakan PNS di Kota Parepare didominasi oleh guru dimana jumlah guru perempuan lebih banyak daripada jumlah guru laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar PNS di Kota Parepare merupakan lulusan perguruan tinggi dengan jenjang sarjana D-IV/SI. Hal ini mengakibatkan jumlah PNS golongan III paling dominan di Kota Parepare.²⁹

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare yaitu sebesar 97 / 96,56 (Kurang dari 100). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dimana dari 100 wanita hanya terdapat 97 laki-laki; dengan rincian terdapat 67.217 jiwa penduduk laki-laki dan 69.686 jiwa penduduk perempuan .

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota Parepare berjumlah 97.297 orang yang terdiri dari 58.978 orang Angkatan kerja dan 38.318 orang Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sudah bekerja ada sebanyak 54.812 orang atau sebesar 92,94 persen, sedangkan sisanya yaitu 4.166 orang masih menganggur atau sebesar 7,06 persen.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2015. (Parepare municipality in figures, 2015) hal.13

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja (TPAK) . TPAK Kota Parepare tahun 2014 adalah sebesar 60,62 persen, ini berarti bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Parepare ada sebanyak 60,62 persen pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (penduduk produktif). Indikator lainnya yang sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Parepare Tahun 2014 sebesar 4,28 persen, ini berarti bahwa ada sebanyak 4,28 persen penduduk usia kerja yang masih menganggur.³⁰

Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga/ melakukan kegiatan lainnya. Mayoritas pencari kerja yang terdaftar dan yang telah ditempatkan oleh Disnaker, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah laki-laki dengan rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA/ sederajat

Dilihat dari lapangan usaha, sebagai besar penduduk Kota Parepare bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebanyak 20.657 orang atau sekitar 37,69 persen. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar adalah sektor jasa perorangan dan kemasyarakatan sebanyak 16.904 orang atau sekitar 30.84 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.³¹

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2015. (Parepare municipality in figures, 2015) hal.37-39

³¹ Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2015. (Parepare municipality in figures, 2015) hal.40-41

B Peran Partai Golkar Kota Pare Pare dalam Meningkatkan kuantitas & keterpilihan anggota partai di pemilu legislative periode 2009 dan 2014

1. Fungsi Partai Politik (Partai Golkar)

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi Negara dan ia baru ada di Negara modern.³² Selama masa pemerintahan orba, Golkar selalu memenangkan Pemilu. Walaupun secara akumulatif Golkar menang di Pemilu 1997, akan tetapi rakyat tidak puas dengan keadaan tersebut, Karena pemerintahan yang korup, hanya mementingkan KKN konglomerat dan keluarga Presiden soeharto.³³

DPRD Kota Parepare adalah Lembaga Legislatif tingkat Kota yang berada di wilayah Kota Parepare. Anggota DPRD Kota Parepare dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD & DPRD , perwakilan anggota DPRD Kota Parepare berjumlah

³² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 397

³³ A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal. 108

25 orang. Dari tahun ke tahun Partai Golkar yang mayoritas menduduki kursi DPRD di Parepare.

2. Program Partai Golkar DPD II di Kota Parepare

Kepengurusan DPD II Partai Golkar kota Parepare didasari oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan Nomor: KEP-M.15.2/SK/DPD/PG/III/2014 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Kota Parepare Masa Bhakti 2009-2015 (HASIL PENYEMPURNAAN) Tanggal 16 Maret 2014 dengan jumlah pengurus sebanyak 119 orang. Dalam hal ini peran DPD II Partai Golkar kota Parepare dituangkan dalam beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Tudang Sipulung

Tudang Sipulung adalah upaya pendekatan Partai Golkar kepada masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Forum Tudang Sipulung ini adalah wadah silaturahmi antara pengurus DPD II Partai Golkar kota Parepare dengan para Tokoh masyarakat , Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kelompok Tani dan Nelayan dan Masyarakat lainnya. Forum ini digunakan untuk menyampaikan eksistensi keberadaan Partai Golkar di Parepare sekaligus sebagai forum untuk menyampaikan keberhasilan program Pembangunan yang juga adalah Ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Sampai hari ini, telah dilaksanakan Tudang Sipulung sebanyak 8 kali. Program ini masih menyisakan 14 titik dan dalam waktu dekat ini akan segera direalisasikan.³⁴

³⁴ Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare.hal.4

b. Pasar Murah

Program Pasar Murah Partai Golkar Kota Parepare telah berlangsung selama 3 tahun setiap memasuki bulan Suci Ramadhan. Program Pasar Murah ini dilaksanakan dengan bekerja sama Yayasan Taufan Pawe Center. Pelaksanaan Pasar Murah ini menysasar semua Kelurahan di Kota Parepare. Komoditi yang dijual adalah 9 (Sembilan) bahan pokok dengan standar harga lebih murah 30% dari harga pasaran.

c. Buka Puasa dan Safari Ramadhan

Buka Puasa dan Safari Ramadhan adalah Program rutin yang dilaksanakan oleh DPD II Partai Golkar Kota Parepare setiap tahun. Menjelang Ramadhan Partai Golkar mengawali dengan membagikan Imsyakiyah Ramadhan semua Masjid di Kota Parepare. Pelaksanaan buka Puasa berlangsung di semua Kecamatan dengan menghadirkan beberapa komunitas, seperti buka puasa dengan Buruh pelabuhan dan pedagang asongan, Buka puasa dengan juru Parkir, Sopir Angkot, Tukang Becak dan Petugas Kebersihan (Laskar Adipura). Safari Ramadhan juga dilaksanakan di semua Kecamatan yang dihadiri oleh Ketua DPD II Partai Golkar serta para Pengurus semua tingkatan.³⁵

Sebagaimana yang di jelaskan pada program pasar murah dan buka puasa safari ramadhan tersebut yang substansinya mengarah kepada perhatian kepada masyarakat kalangan menengah kebawah agar dapat menikmati dan menyambut bulan ramadhan dengan tidak di beratkan dengan harga sembako atau kebutuhan

³⁵ Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare.hal.5

lainnya yang di butuhkan di saat bulan ramadhan, sebagaimana yang di jelaskan oleh Sekertaris Jendral Partai Golkar DPD II Kota Parepare Letkol Purnawirawan Suhandoyo sebagai berikut:

“Pasar murah dan Buka puasa dilakasankan pada umumnya demi kepentingan rakyat, waktu pelaksanaanya berjarak antara 1 bulan. Pasar murah dalam hal ini membantu masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi sandang dan pangan mereka untuk menyambut bulan ramadhan. Program ini melibatkan seluruh kader Partai Golkar baik yang sedang menjabat di pemerintahan maupun anggota yang terdaftar, tentu keterlibatan mereka berdampak positif di mata masyarakat sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap fungsi partai dan pemerintah yang menjabat.”³⁶

Berdasarkan apa yang di jelaskan di atas bahwa Program yang di laksanakan dan di canangkan oleh partai untuk rakyat tidak lepas dari strategi partai untuk meningkatkan elektabilitas partai dan kader-kadernya baik itu di pemerintahan sampai non pemereintahan.

d. Pelaksanaan Rangkaian HUT Partai Golkar

Adapun rangkain pelaksanaan HUT Partai Golkar ke-51 antara lain: Ziarah TMP, Anjongsana ke semua Panti Asuhan, Lomba Mewarnai Tingkat Taman Kanak-kanak, Lomba Domino dan Sunnatan Massal sebanyak 112 anak.

e. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Partai Golka Parepare berlangsung meriah yang dihadiri kurang lebih 1.000 orang dengan menghadirkan penceramah DR.H. Dasa’ad Latif. Pada peringatan Maulid tersebut juga diserahkan penghargaan

³⁶ Wawancara dengan Letkol Purnawirawan Suhandoyo, Sekertaris Jendral Partai Golkar DPD II Kota Parepare. Pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 13.25 wita

“Golkar Award” kepada H. Samsu Lasattungyang telah membantu Partai Golkar dalam menyiapkan 1 (satu) unit mobil tangki pada Program Golkar Peduli berupa bantuan Air Bersih Gratus.

f. Program Golkar Peduli Berupa Pembagian Air Bersih Gratis

Dalam mengatasi krisis air bersih di Kota Parepare, maka DPD II Partai Golkar Parepare melaksanakan Program pembagian air bersih gratis di daerah rawan air bersih. Program ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dan sangat di respon positif oleh masyarakat.³⁷

g. Program Aksi Sosial

DPD II Partai Golkar Parepare juga terlibat langsung dalam AKSI SOSIAL kepada masyarakat yang ditimpah musibah atau bencana. Program Aksi Sosial ini antara lain: Menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Cempae Soreang, memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Lompoe, bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kelurahan Bumi Harapan.³⁸

3. Memfasilitasi pendidikan politik untuk Prestasi Kader

Seperti halnya dengan program-program yang dapat mempengaruhi kualitas kader di pandangan masyarakat tentu pendidikan politik tidak kalah pentingnya dapat mempengaruhi kuantitas terpilihnya kader Golkar di Kota Parepare. program-program yang di sandingkan dengan pendidikan politik tersebut yang akan

³⁷ Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare.hal.6

³⁸ Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare. hal.

menunjang kedepannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua DPRD kota Parepare Bapak Ir. Kaharuddin Kadir, M.Si pada tanggal 26 oktober 2016 yang mengatakan:

“Dalam menyusun Program Partai Golkar setiap tahun gregetnya berbeda.yang dimana menyusun kegiatan itu dapat membumikan masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwwa Golkar masih eksis.dengan program inilah Golkar dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan bersinergi dengan program walikota. karena setiap program akan melibatkan seluruh anggota Golkar. Dalam mengusung calon legislatif kita melihat ke aktifitas pengurus dan kader-kader Golkar dalam mengikuti setiap kegiatan bukan hanya hadir tetapi dapat memposisikan diri andil dalam setiap kegiatan dilihat dari loyalitas atau kesetiaan terhadap partai dan dedikasi bagaimana dia bisa membawa diri sebagai kader Golkar.”³⁹

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas bagaimana Golkar berperan aktif dalam setiap program yang diusungkannya dengan melihat prestasi dari kadernya yang akan di usungkan dalam pemilihan yang dimana ketua DPRD Kota Parepare yang sedang menjabat saat ini merupakan salahsatu kader Golkar yang terpilih dalam Pemilu legislatif DPRD Kota Parepare tahun 2009 dan terpilih lagi pada tahun 2014 dan ia mendapatkan perolehan suara yang terbanyak. Seperti tabel Hasil Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Kota Parepare:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

³⁹ Wawancara dengan Ir. Kaharuddin Kadir, M.Si, , Ketua DPRD kota Parepare di Kantor DPRD kota Parepare. pada tanggal 26 oktober 2016 pukul 10.30 wita

Tabel 4.1
Pemilu legislatif tahun 2009



HASIL PEROLEHAN KURSI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
DPRD KOTA PAREPARE 2009-2014
BAPPILU DPD II PARTAI GOLKAR KOTA PAREPARE



NO.	NAMA	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
			PARTAI	CALEG	
DAERAH PEMILIHAN 1					
JUMLAH SUARA SAH					21.852
BILANGAN PEMBAGI PEMILIH					2.428
1	H. MUH. YUSUF NONCI	PPRN	1.074	596	
2	SYAEFUDDIN LA INTANG	PKS	1.445	436	
3	FADLY AGUS MANTE	PPI	1.147	814	
4	Drs. MUHAMMAD SIRADZ A. SAPADA	PDK	1.487	871	
5	H. MUHADIR HADDADE	PARTAI GOLKAR	6.033	1.253	
6	Ir. KAHARUDDIN KADIR, M.Si	PARTAI GOLKAR	6.033	1.304	
7	BAKHTIAR TAEBE	PARTAI GOLKAR	6.033	735	
8	H. YANGSMID RAHMAN, SE	PARTAI DEMOKRAT	1.170	931	
9	Hj. ZAENAB SYAMSUDDIN, SH	PPP	1.184	583	
DAERAH PEMILIHAN 2					
JUMLAH SUARA SAH					16.156
BILANGAN PEMBAGI PEMILIH					2.692
1	Ir. H. A. AMIR MACHMUD	PKPI	1.467	1.251	
2	H. A. RAHMAN SALEH, SE	PKS	1.198	675	
3	KURTAFAFI, S.Sos	PAN	1.255	508	
4	Hj. A. DALA ULENG TAHA	PPI	1.186	1.103	
5	H. SULEMAN, SE	PARTAI GOLKAR	2.308	579	
6	Drs. ANDI DARMAWANGSA	PDIP	1.928	1.573	
DAERAH PEMILIHAN 3					
JUMLAH SUARA SAH					25.632
BILANGAN PEMBAGI PEMILIH					2.563
1	RIDWAN ROMBE	PARTAI HANURA	1.890	770	
2	Hj. FERSI ASNITA AGANG SATTUNG	PPRN	1.001	720	
3	MUH. IQBAL CHALIK, SE	PKS	1.001	495	
4	ANDI ARWIN	PAN	1.620	365	
5	HARMAN ACHMAD	PDK	1.097	991	
6	H. MINHAJUDDIN AHMAD, S.Ag	PARTAI GOLKAR	5.017	775	
7	SAPRI TAJUDDIN, S.Sos	PARTAI GOLKAR	5.017	1.092	
8	H. SUDIRMAN TANSI, SE	PBB	1.652	513	
9	SATRIYA	PDIP	1.194	884	
10	ANDI NURHANJAYANI	PARTAI DEMOKRAT	2.023	665	

Nama yang bertanda dengan warna kuning merupakan nama yang mendapatkan perolehan tertinggi pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Partai Golkar sangat berperan dalam kemenangan kader-kadernya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Fraksi Golkar di DPRD kota Parepare Bapak H.Minhajuddin Ahmad, S.Ag pada tanggal 9 november 2016 yang mengatakan:

Peran Partai Golkar sangat luar biasa dimana menempatkan kita sebagai kader dan dicalonkan dan saya terpilih ditahun 2009 dan terpilih lagi di tahun 2014 yang bisa dikatakan saya aktif di Partai Golkar pada tahun 1989 sampai sekarang. Setiap saat kita melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam setiap program dan kegiatan sehingga menambah peran kita kemudian masyarakat menilai bahwa kita masih layak dipilih untuk mewakili suara masyarakat dalam legislatif. Kami melakukan advokasi kepada masyarakat terkait apa kebutuhan mereka menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat. Dan kami juga berperan sebagai legislatif menyusun perundang-undangan dan perda yang akan di nilai masyarakat sehingga masyarakat memilih kita pada pemilihan selanjutnya. Saya memilih Partai Golkar merupakan partai yang banyak menyentuh masyarakat melalui program-programnya sesuai dengan hati nurani saya dimana Golkar merupakan benteng pancasila kemudian pembentukan Golkar ini merupakan partai yang dibentuk untuk menjaga NKRI.”⁴⁰

Sesuai yang dijelaskan diatas bahwa Partai Golkar sudah memberikan efek yang besar terhadap para calon kader yang terpilih periode 2009-2014 ditambah lagi program-programnya yang juga sejalan dengan program Walikota kota Parepare, misalnya tudang sipulung, pasar murah, buka puasa dan safari ramadhan, pelaksanaan rangkaian HUT Partai Golkar, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, Program Golkar peduli berupa pembagian Air bersih gratis, dan program aksi sosial, hal ini kemudian menjadi perhatian dan menarik simpatik masyarakat.

⁴⁰ Wawancara dengan H.Minhajuddin Ahmad, Ketua Fraksi Golkar di DPRD kota Parepare. pada tanggal 19 november 2016 pukul 13.30 wita

Setiap Organisasi Politik hanya dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila, memiliki kader yang dapat diandalkan yang merupakan tulang punggung dan motor penggerak organisasi. Oleh karena itu, di awal kepemimpinan seperti di Partai Golkar kota Parepare langsung melaksanakan Program kader Penggerak Teritorial Desa (KARAKTERDES) sebanyak 22 angkatan dengan melahirkan sebanyak 4.400 orang kader. Sebagian besar dari kader ini akan menjadi Program prioritas dan berkesinambungan pada periode kepengurusan selanjutnya.⁴¹


Setiap daerah jelas memiliki Partai jagoan atau partai yang mayoritas kadernya menjabat di pemerintahan, sebagaimana yang di jelaskan oleh salah satu kader partai bapak Unding selaku petugas harian sekretariat Partai Golkar DPD II menjelaskan

*“Dengan lantang dan penuh percaya diri menyatakan bahwa Partai Golkar adalah partai Kota Parepare yang dimana warganya mayoritas pro dengan partai Karya, berarti Golkar masih dapat di aduh di pertarungan Pemilu apapun karena elektabilitas yang tinggi sangat berpengaruh untuk memenangkan pertarungan politik. tidak kalah pentingnya Walikota Parepare yang berasal dari hasil kader yang baik dari Partai Golkar DPD II Kota parepare dimana program kerjanya pro masyarakat dan mampu menambah kepercayaan masyarakat Kota Parepare. Hal ini pula dapat kita buktikan dari hasil porolehan suara secara keseluruhan yang diperoleh di Pemilu Legislatif 2014 tahun lalu”.*⁴²

⁴¹ Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare. hal. 6

⁴² wawancara dengan bapak Unding, Petugas Harian Sekretariat Partai Golkar DPD II Kota Parepare di Sekretariat jl. jendral sudirman Kota Parepare. pada tanggal 26 oktober 2016 pukul 11.00 wita

Tabel 5.1
Pemilu Legislatif tahun 2014



**RANGKING PEROLEHAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPRD TK. II KOTA PAREPARE TAHUN 2014**

NO.	PARTAI	JUMLAH SUARA PARTAI	JUMLAH KURSI	PERSENTASE (%)
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	15,995	5	20.67%
2	PARTAI DEMOKRAT	11,682	4	15.09%
3	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8,222	2	10.62%
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	7,577	3	9.79%
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7,249	3	9.37%
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6,884	2	8.89%
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4,287	1	5.54%
8	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4,082	1	5.27%
9	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3,776	2	4.88%
10	PARTAI BULAN BINTANG	3,262	1	4.21%
11	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2,467	0	3.19%
12	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,910	1	2.47%
	JUMLAH	77,393	25	

Sumber: kantor/sekretariat Partai Golkar DPD II Kota Parepare

Tabel 5.2
Pemilu Legislatif

5

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN CALEG TERPILIH
PEMILU ANGGOTA DPRD TK. II KOTA PAREPARE TAHUN 2014**

NOMOR URUT	PARTAI	NAMA CALEG TERPILIH	DAPIL	JUMLAH SUARA PARTAI	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA CALEG	PERSENTASE %
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	AMIRUDDIN SAID	I	3,776	2	1,235	8.00%
		HERI AHMADI, SE	III			528	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANDI MUH. FUDAIL, SE	I	1,910	1	1,121	4.00%
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	S. PARMAN AGOES MANTE	II	6,884	2	1,237	8.00%
		MUHAMMAD IQBAL	III			1,368	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	HJ. APRIYANI DJAMALUDDIN	I	7,249	3	1,564	12.00%
		Drs. H.A. DARMAWANGSA	II			1,148	
		SATRIYA	III			1,766	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	<i>Ir. H. KAHARUDDIN KADIR, M.Si</i>	I	15,995	5	1,451	20.00%
		<i>JOHN PANANANGAN, SE</i>	I			1,135	
		<i>H. SULEMAN, SE</i>	II			1,399	
		<i>H. MULIADI, S.Sos</i>	III			1,890	
		<i>H. MINHAJUDDIN AHMAD, S.Ag</i>	III			1,245	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANDI TAUFAH ARMAS	III	4,082	1	766	4.00%
7	PARTAI DEMOKRAT	H. TASMING HAMID, SE	I	11,682	4	2,619	16.00%
		H. YANGSMID RAHMAN, SE	I			1,017	
		M. RAHMAT SJAMSU ALAM	II			1,519	
		ANDI NURHANAYANI	III			1,098	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANDI FIRDAUS DJOLONG, SE	I	7,577	3	814	12.00%
		KURTAFAFI, S.Sos	II			1,394	
		HJ. MUSDALIFAH PAWE, SH	III			1,290	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ABDUL SALAM LATIEF	I	4,287	1	700	4.00%
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	H. MUH. YUSUF NONCI	II	8,222	2	869	8.00%
		RIDWAN ROMBE	III			1,409	
14	PARTAI BULAN BINTANG	H. SUDIRMAN TANSI, SE	III	3,262	1	781	4.00%
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	-	2,467	-	-	0.00%
		JUMLAH		77,393	25		

Sumber: kantor/sekretariat Partai Golkar DPD II Kota Parepare

Setiap Perogram Partai tentu melibatkan Kadernya di Kalangan Masyarakat sebagaimana yang sampaikan oleh ibu idah Hamda sebagai kader Partai Golkar DPD

II Kota parepare menjelaskan bahwa:

Kami kader partai tentunya selalu berada dalam kepentingan partai apapun program yang di kerjakan kami akan berpartisipasi agar tercapai setiap substansi yang ingin di capai oleh Partai Golkar. Contoh misalnya dalam menghadapi Pemilu Legislatif kemarin kami tentunya selaku kader partai agar meningkatkan publikasi demi terpilihnya setiap calon yang di usun oleh partai, cara yang biasa kami lakukan adalah bersentuhan langsung ke masyarakat terdekat kami, baik itu keluarga, tetangga, ataupun saudara-saudara. maka tidak perlu diragukan loyalitas dan kinerja dari kader Partai Golkar.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kader Partai Golkar di DPRD Kota Pare Pare pada Pemilu Legislatif periode 2009 dan 2014

1. Aktor Politik & Kekuasaan

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang sangat besar. Daya rusak kekuasaan telah lama di ungkap dalam suatu adagium ilmu politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Siapapun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapatnya. Begitu memesonanya daya tarik

kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perebutan atau kompetisi yang terkadang dapat menelan korban jiwa.⁴³

Daya rusak kekuasaan bersumber dari watak kekuasaan yang menggoda serta memesona oleh sebab itu, para pemegang dan pemburu kekuasaan selalu cenderung menghalalkan cara dalam mencapai tujuannya. Maka, kekuasaan harus di kontrol dengan kekuatan yang sama besarnya agar tidak menghancurkan pranata sosial dan politik.⁴⁴

2. Faktor Jaringan dan Sistem Pemilihan Umum

Maka, dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberukan suara).

Pemilu yang di gunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama

⁴³ Muhammad Labolo Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 52

⁴⁴ Muhammad Labolo Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 53

menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

Sistem Pemilihan Umum diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Manakala sebuah lembaga perwakilan rakyat apakah itu DPR ataupun DPRD dipilih, maka sistem pemilihan mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Sementara itu, pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suara yang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat kenyataan seperti itu, maka betapa pentingnya sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam sistem pemilihan adalah apa yang disebut sebagai “*electoral formula*”, yaitu apakah akan menggunakan sistem pluralitas yang di Indonesia banyak disebut sebagai sistem distrik ataukah sistem *proportional representation* dengan berbagai macam variasinya, seperti misalnya sistem sisa terbanyak, *single transferable vote*, *single non-transferable vote*, *d’hondt rule*, *sainte lague*, dan lain-lain. Elektoral formula menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang bersaing.⁴⁵

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut “*district magnitude*”, yaitu jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah distrik. Besar

⁴⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 255

sebuah distrik dapat berbeda satu sama lain karena jumlah perbedaan penduduk. Besaran kursi yang diperebutkan bagi sebuah distrik(district magnitude) merupakan suatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib partai-partai politik di kemudian hari. Ada Negara yang menggunakan wilayah sebagai sebuah distrik, seperti Indonesia, sehingga memungkinkan partai kecil untuk terjamin mendapatkan kursi. Tetapi ada pula negara negara yang membagi wilayah negara kedalam distrik, dengan besaran *magnitude* sebuah distrik, akan semakin besar partai kecil akan terlindungi. Sebaliknya, kalau distric magnitudenya kecil, maka partai yang memperoleh 10% dari total suara pun tidak akan memiliki peluang.⁴⁶

Hal Ketiga yang juga harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang disebut oleh kalangan ilmuwan politik sebagai “*elektoral threshold*”, yaitu jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh oleh seseorang atau sebuah partai untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan.⁴⁷

Setelah proses penghitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara

⁴⁶ Afan Gaffar, *Poitik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2006).hal.255

⁴⁷ Afan Gaffar, *Poitik Indonesia transisi menuju demokrasi*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2006).hal.256

dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.⁴⁸

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Komesioner Ketua KPU Kota Parepare Ibu Nur Nahdiah, bahwa:

“Jika melihat dari data antusias masyarakat kota parepare dalam pemilihan legislatif sangat jelas bahwa tingkat partisipasi dalam memilih di tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 hal ini juga di perjelas dengan kritisnya masyarakat dalam memerankan hak suara mereka masing-masing sebagai contoh, pertama, pada saat tim KPU melakukan sosialisasi di lapangan masyarakat sangat banyak melemparkan pertanyaan ke pegawai-pegawai KPU yang bertugas kedua, melaporkan tetangga atau kerabatnya ke DPT bagi yang tidak terdaftar dalam Pemilu, ketiga, tidak menerima sogokan dari calon-calon legislatif yang bertarung (pemilih profesional). Dalam pemilihan legislatif setiap calon berhak mendapatkan standar perolehan suara yang telah ditetapkan di setiap daerah pemilihan (Dapil) sesuai dengan jumlah Pemilih di setiap daerah, contoh Dapil 1 Soreang 2500 sekian angka bulat untuk satu kursi kemudian calon anggota Golkar 1 memperoleh suara 1900, anggota 2 memperoleh 1700 dan anggota ke 3 memperoleh suara 900 maka jumlah keseluruhan jika di totalkan 4500 suara maka mereka berhak mendapatkan hanya 1 kursi dan jumlah suara yang lebih tidak dapat di hitung lagi (hangus).maka kesimpulan dari perolehan suara dari setiap calon yang di daftar oleh partai akan sebagian menjadi sia-sia atau tidak dapat dipergunakan akibat bilang pembagi dari sistem yang telah di tetapkan (angka DPP)”.⁴⁹

Sesuai dengan pernyataan yang di lontarkan oleh komisioner Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ibu Nur Nahdiah banyak menjelaskan tentang bagaimana sistem Pemilihan Umum Legislatif yang menjadi pengaruh keterpilihan kader Partai Golkar di Kota Parepare.

⁴⁸ Muhammad Labolo Teguh Ilham, *Partai politik dan sistem pemilihan umum di indonesia*, (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal.54

⁴⁹ Wawancara dengan Nur Nahdiah, Komisioner Ketua KPU Kota Parepare 2013-2018. pada tanggal 31 oktober 2016 pukul 11.24 wita

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. dengan kata lain, kita dapat juga mengartikan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Ciri sebuah sistem adalah *pertama*, bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu memengaruhi seluruh sistem. *Kedua*, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. juga perlu diperhitungkan bahwa sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu.⁵⁰

Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni: *kesatu*, adalah objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya. *kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Labolo Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 56

⁵¹ Muhammad Labolo Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hal. 57

3. Faktor sosialisasi, ekonomi, hubungan emosional dan pentingnya pengawasan dalam Pemilu legislatif

Maka peran penting dari Panitia Pengawas Pemilu sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem pemilihan, agar berjalan sesuai yang telah ditetapkan oleh UU yang berlaku di Negara Indonesia. sebagaimana yang dijelaskan kondisi Pemilihan Legislatif oleh bapak Sainal Asnul S.IP ketua PANWASLU tahun 2014, pada tanggal 10 November 2016 yang mengatakan:

“Melihat kondisi pemilihan legislatif yang berlangsung di kota Parepare pada tahun 2014 secara umum masih terkesan masyarakat kurang profesional dalam memilih di karenakan terjadinya ketidak dewasaan menggunakan hak suara, contoh adanya surat suara yang digunakan oleh oknum yang bukan miliknya, melakukan pemilihan di dua TPS, dan menerima sogokan dari beberapa calon Legislatif (money politics). kurangnya pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi tentu mempengaruhi sistem pemerintahan dan tidak bijaknya elite politik dalam memainkan strategi dapat mencederai sistem perpolitikan di Negara Indonesia yang kita cintai. Maka kesimpulannya pemilihan dapat berlangsung dengan baik ketika pemahaman dan pendidikan politik dapat tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat-masyarakat Kota Parepare.”⁵²

Menurut isi wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya kesenjangan pemilu yang tidak berjalan dengan baik sesuai harapan, mengakibatkan berdampak kepada tidak idealnya dalam memilih calon yang di usun oleh setiap partai yang ikut dalam perebutan kursi di DPRD kota Parepare, berikut adalah penjelasan oleh mantan anggota DPRD periode 2009-2014 Kota Parepare bapak Sapri Tajuddin S.SOS pada tanggal 8 November 2016 yang mengatakan:

⁵² Wawancara dengan Sainal Asnul S.IP, Ketua Panwaslu Kota Parepare tahun 2014. pada tanggal 10 November 2016 pukul 13.20 wita

“Keterpilihan kader dalam pemilu legislatif utamanya sangat di pengaruhi oleh kebesaran partai kemudian terkait dengan konsituen yang terpelihara dengan baik, kemudian waktu pemilihan kemenangan pada periode 2009-2014 sangat di pengaruhi oleh citra dari walikota waktu itu pak Zainkatoe harus di akui, akan tetapi pada kegagalan pemilu legislatif pada periode 2014-2019 di karenakan beberapa hal, contoh masih pragmatismenya masyarakat dalam mengikuti pemilu, dan tidak transaksional, artinya ketika 2009 murni hati nurani di banding pemilu legislatif 2014 waktu kegagalan saya. pembuktian saya pada hal ini dapat saya akui karena tingkat elektabilitas, gaya sosialisasi dan tingkat elektabilitas saya masih unggul di banding calon pemenang kemarin yang berasal dari partai lain. penyebab tidak berjalan dengan baiknya demokrasi atau pemilu legislatif kita itu di akibatkan oleh oknum elite politik yang tidak bertanggung jawab, terjadinya suara yang di hargai dengan uang itu sangat terlihat di lapangan yang mencederai pemilu hal ini jg tdk terlepas dari pengaruh sistem pemilu yang berpotensi melahirkan money politic, yang sangat tidak mencerdaskan masyarakat dalam berpartisipasi politik. dengan berubahnya sistem inilah sehingga melahirkan serangan fajar dan money poitic yang menurut saya menjadi penyebab tidak konsistennya masyarakat dalam memilih seorang pemimpin (pemilih tradisiona) bukan pemilih yg profesional (pemilih rasional) sehingga saya tidak dapat terpilih kembali sebagai anggota DPRD periode 2014-2019 di Kota Parepare.”⁵³

Berdasarkan apa yang di jelaska diatas bagaimana kader Partai Golkar yang gagal dalam memenangkan kursi DPRD di Kota Parepare Periode 2014-2019 menjadi tolak ukur akan pengarus partisipasi masyarakat dalam memilih yang masih membutuhkan pendidikan politik agar menjadi pemilih yang rasional dan tak lepas dari fungsi sistem pemilihan legislatif yang menurut penjelasan di atas bisa berpotensi terjadinya praktek *money politic* yang tidak mencerdaskan pemilih dalam mengambil keputusan pada saat di TPS (tempat pengambilan suara). maka agar berjalan dengan baik suatu sistem pemilihan harus di dukung oleh pendidikan politik

⁵³ Wawancara dengan Sapri Tajuddin S.SOS, mantan DPRD periode 2009-2014 Kota Parepare di jln mattirotasi.pada tanggal 8 November 2016 pukul 11.20 wita

yang efektif dan tepat dalam menyampaikan, dengan cara yang telah di atur tanpa mencederai UU pemilu yang telah di tetapkan.

Seperti sebagaimana yang sering dilakukan kader Partai Golkar yang satu ini memiliki strategi lain untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat di daerah pilihannya, melalui hasil wawancara yang di sampaikan oleh mantan DPRD periode 2009-2014 Kota Parepare Bapak Bakhtiar Taebe pada tanggal 8 November 2016 yang mengatakan:

*“Selain dari pada melaksanakan program motivasi partai dalam sosialisasi dan pendidikan Politik di masyarakat, seringkali kami kader dan saya pribadi melakukan strategi lain untuk bersentuhan langsung ke masyarakat-masyarakat agar terjalin hubungan yang erat dan meninggalkan kesan yang baik untuk di nilai sebagaimana mestinya kami waktu masih menjabat sebagai anggota DPRD Periode 2009-2014 di kota Parepare, keluh kesah masyarakat di lapangan sudah menjadi makanan sehari-hari kami untuk didengarkan, sebagai anggota DPRD fraksi golkar keluhan-keluhan masyarakat kami tampung dan akan menyampaikan langsung di gedung Paripurna saat pelaksanaan Rapat-rapa atau Rapat kerja. Agar tercipta program baru yang pro dengan rakyat. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap urusan-urusan birokrasi pemerintahan menjadi kesempatan emas bagi kami untuk turun tangan membantu dan mempermudah urusan seperti contoh pengurusan KTP, Kertu Rumah tangga, Kartu Keluarga, PBB, ASKES dan lainnya, seperti inilah kerja kami untuk bersentuhan langsung ke masyarakat dan memberi pendidikan politik, bukan pada saat ada kepentingan seperti Pemilu baru kita mendekati masyarakat, waktu yang singkat untuk bersosialisasi ke masyarakat akan tidak menimbulkan kesan hingga akhirnya elite politik di partai lain kerak ini meninggalkan kesan yang lain dengan cara yang tidak cerdas seperti halnya menyogok atau mencurangi masyarakat dengan cara yang tidak mendidik yang menjadi istilah money politik. jadi untuk mengambil perhatian masyarakat untuk memperbaiki elektabilitas ialah sentuh masyarakat berikan haknya dalam sosialisasi politik dan pendidikan politik yang baik sesuai nilai Demokrasi yang kita gunakan di Negara ini”.*⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Bachtiar Taebe, mantan DPRD Periode 2009-2014 Kota Parepare pada tanggal 9 November 2016 pukul 12.15 wita

Indoktrinasi politik ialah proses yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah untuk menanamkan nilai, norma dan simbol yang dianggap baik oleh pihak tersebut terhadap masyarakat, maka di butuhkan, materi yang di sampaikan dalam proses pendidikan dan sosialisasi ke masyarakat meliputi posisi, hak dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara.

Sebagaimana disampaikan oleh kader Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPRD TK.II Kota Parepare yang telah memenangkan Pemilu Legislatif dua kali berturut-turut mulai dari periode 2009-2014 & 2014-2019. Bapak H. Suleman, SE tentu terbukti telah berhasil menanamkan elektabilitas dan citra yang baik terhadap masyarakat sebagaimana yang di jelaskan:

“Untuk mendapat perhatian yang baik dari masyarakat tentunya harus meberikan perhatian yang baik terhadap masyarakat, yang utama harus kita lakuakan adalah bekerja dengan keinginan masyarakat komitmen dengan yang kita ucapkan terhadap masyarakat dan prilaku yang tidak di nilai buruk oleh masyarakat harus sangat di perhatikan. banyak teman-teman dari Partai Golkar kurang melakukan Pendekatan, sosialisasi dan silaturahmi yang baik, kadang melupakan bahwa jabatan adalah amanah dan terlena akan kehidupan sosial, sehingga di pemilihan berikutnya masyarakat tidak percaya lagi. tapi keberhasilan dalam pemilu tentu 70 % adalah pengaruh dari kekuatan dan kinerja Partai Golkar sendiri”⁵⁵

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Kader Partai Golkar yang di usung untuk mengikuti Pemilu Legislatif di harapkan memiliki kekuatan politik atau elektabilitas yang baik di pandangan masyarakat, agar mampu membawa citra yang

⁵⁵ Wawancara dengan H. Suleman, anggota DPRD Periode 2009-2014 & 2014-2019 Kota Parepare pada tanggal 9 November 2016 pukul 13.20 wita

baik melalui Strategi Partai atau kader yang akan bertarung di Pemilu Legislatif. Dalam memenangkan pemilihan umum tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya agar di pimpin/diwakili oleh pemerintah sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat, maka masyarakat sangat memperhatikan tokoh-tokoh yang mencalonkan diri dalam pemilu agar tidak salah dalam menentukan pilihannya, karena masyarakat sadar akan kesejahteraan tercapai melalui pemerintahan yang di pimpin atau di wakili oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Partai tentunya berperan dalam menentukan setiap calon yang di usung dalam pemilu, maka Partai Golkar telah menyeleksi kader yang mampu bertarung dan memiliki elektabilitas yang baik agar dapat terpilih oleh masyarakat, bagi kader Partai Golkar yang ikut bertarung tentunya memiliki bekal dari pendidikan Partai misalnya bersosialisasi yang baik di masyarakat utamanya daerah Pemilihan, bersilaturahmi, mendalami dan mengaplikasikan akhlak yang baik di pandang dan banyak pula cara lain yang mampu bersentuhan langsung dengan masyarakat dan meninggalkan kesan yang baik. Selebihnya tinggal masyarakat yang menentukan siapa yang akan mereka pilih dalam pemilu legislatif. Sistem pemilihan umum tentunya juga menjadi tolak ukur agar memperoleh hasil yang baik agar terciptanya pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Parepare.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian diatas yaitu sebagai berikut:

1. Partai Golkar dalam mengusung kadernya memiliki tiga hal sebagaimana yang biasaa dilakukan oleh partai politik lainnya yaitu menyeleksi calon-calon, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif). Dalam menyusun Program partai Golkar setiap tahun gregetnya berbeda.yang dimana menyusun kegiatan itu dapat membumikan masyarakat. Supaya masyarakat tahu bahwwa Golkar masih eksis.dengan program inilah Golkar dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan bersinergi dengan program walikota. karena setiap program akan melibatkan seluruh anggota Golkar. Dalam mengusung calon legislatif kita melihat ke aktitifan pengurus dan kader-kader Golkar dalam mengikuti setiap kegiatan bukan hanya hadir tetapi dapat memposisikan diri andil dalam setiap kegiatan dilihat dari loyalitas atau kesetiaan terhadap partai dan dedikasi bagaimana dia bisa membawa diri sebagai kader Golkar. Upaya-upaya dan strategi tersebut setiap periodenya dalam kompetisi pemilihan umum partai Golkar sangat konsisten dalam mengawal setiap kadernya agar mendapat hasil yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kader maupun partai seperti halnya kegagalan untuk merebut kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, tentunya di negara Demokrasi ini membutuhkan elektabilitas yang baik agar dapat memperoleh suara yang banyak untuk menduduki kursi pemerintahan, hal ini tidak lepas dari pengaruh partisipasi politik masyarakat dan sistem pemilu yang mendukung.

2. Keterpilihan kader dalam pemilu legislatif, utamanya sangat di pengaruhi oleh kebesaran partai kemudian terkait dengan konsituen yang terpelihara dengan baik. kurangnya pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi tentu mempengaruhi sistem pemerintahan dan tidak bijaknya elite politik dalam memainkan strategi dapat mencederai sistem perpolitikan di Negara Demokrasi, bakal calon yang di usung oleh Partai Golkar terkesan tidak terpengaruh untuk melakukan kecurangan dalam persiapan pemilu legislatif 2009 dan 2014 demi menjaga citra nama baik partainya. Kader Partai Golkar dengan kematangannya dalam berpolitik mencerminkan kedewasaannya dalam mengikuti pemilu karena siap mengalami masalah apapun yang terjadi di lapangan pasca dan pra pemilihan legislatif 2009 dan 2014. kekalahannya dan berkurangnya kursi yang di peroleh di periode 2014-2019 menjadi pelajaran bagi partai Golkar dengan hasil analisis masalah, di karenakan tidak mampu memperoleh angka bulat untuk beberapa kursi di setiap Dapil (angka threshold), berdasarkan data pemilu legislatif periode 2009-2014 di 2 kecamatan dengan perolehan secara keseluruhan 8.341 suara Partai Golkar menghasilkan 6 kader yang terpilih menduduki kursi di legistlatif, jika di bandingkan dengan pemilu legislatif periode 2014-2019 di 3 kecamatan dengan perolehan suara secara keseluruhan 13.356 suara Partai Golkar hanya menghasilkan 5 kader yang terpilih untuk menduduki kursi legislatif ini kemudian menjadi dilema dan PR besar bagi Partai Besar, Partai Golkar di Kota Parepare.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

1. Diperlukan adanya kesadaran penuh dari masyarakat dalam berdemokrasi. pandai dalam melihat pergulatan politik yang terjadi di kalangan elite politik dan pemerintahan, memiliki bekal dan ilmu tentang pendidikan politik agar dapat menganalisis secara ilmiah dalam menentukan baik buruknya suatu kebijakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan siap menghadapi kerasnya pertarungan politik di negara demokrasi .

2. Dalam hal ini Partai Golkar dan Partai lainnya yang terdaftar dalam Pemilu dapat memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi hak dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai. kemudian memberikan pendidikan politik tersebut bagi masyarakat pula agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diselenggarakan pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus serta masyarakat.
3. Perlunya evaluasi yang di lakukan partai dan penyelenggara Pemilu Legislatif dalam melihat hasil yang di peroleh satu periode pemerintahan, dan memperhatikan sistem pemilu yang berlangsung agar menyadari Apabila terjadinya gejolak politik yang berdampak tidak mendidik dengan baik terhadap perkembangan demokrasi masyarakat, yang menimbulkan pandangan bahwa satu suara dapat dibeli dengan uang di negara demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Surah Ali-Imran Ayat 159, (Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2006)
- Alfianti,Rahman “*Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018*” Skripsi (Makassar : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- A.Rahman H.I“*Sistem politik indonesia*”(Jakarta: Graha ilmu, 2007).
- Asmadianto “*Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014)*” Jurnal Universitas Indonesia Timur Makassar 2014.
- Burhan Bangin”*Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007).
- Denny JA “*Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik*” (Yogyakarta: LK^{IC} Yogyakarta, 2006).
- Denny J.A.”*Partai Politik pun Berguguran.*” (Yogyakarta: LKIS, 2006).
- Gaffar Afan”*Poitik Indonesia transisi menuju demokrasi*”(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2006)
- H.Hamka Haq “*Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*”.(Makassar:Yayasan Al-Ahkam.2003).
- H.I. A.Rahman “*Sistem Politik Indonesia*” (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007)
- Irvan Ansyari “*Analisis Kemenangan Partai GOLKAR di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Sejak Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999*” Skripsi (Makassar : Universitas Diponegoro, Semarang 2014).
- Laporan Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Parepare
- Morissa”*Metode Penelitian Survei*”(Jakarta: Kencana, 2012).

Muhammad Idrus”*Metode Penelitian Ilmu Sosia*”(Yogyakarta: Erlangga. 2009).

Muhammad labolo teguh ilham “*Partai politik dan sistem pemilihan umum di indonesia*”
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Mukhtar “*Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*” (Referensi.Jakarta Selatan:GP
Press Group, 2003)

Nasiwan dan Cholisin “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” (Yogyakarta:penerbit ombak,2012)

Piliang J. Indara “*Mengenal Teori-teori Politik dari sistem politik sampai korupsi*”
(Bandung: Penerbit Nuansa.2006).

Budiarjo.Miriam “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*” (Jakarta:PT Gramedia utama.2008).

Rahman B “*Pengaruh Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi terhadap pemantapan kader
Partai Politik Studi Kasus Terhadap Dewan Pimpinan Daerah (DPD II) Partai
Golkar Kota Makassar*”Skripsi (Makassar. 2013)

Roni Tamara Saputra”*Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam
PEMILU 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)*”
Skripsi (Universitas Mulawarman, Samarinda 2014).

Surbakt Ramlan “*Memahami Ilmu Politik*” (Jakarta:PT Grasindo,1992).

Suhardiman “*Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam PEMILU
(Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)*” Skripsi (Universitas
17 Agustus 1945, Samarinda 2015).

Tandjung Akbar “*Moratorium Politik Menuju Rekonsiliasi Nasional*”(Jakarta:Golkar
Press,2003).

Tomi Lebang”*Berbekal Seribu Akal Pemerintahan Dengan Logika*”(Jakarta.PT Garuda
Pustaka Utama Jakarta, 2006).

VARMA,S.P “*Teori Politik Moderen*”(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010).

Winarno Surakhmad *“Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik”* (Bandung: Tarsito, 1990).

Asmawati Ilyas *”Manajemen Konflik Partai Golkar Pada pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013”*(<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10383.2014>).





Wawancara dengan mantan anggota DPRD Kota Parepare Pak Bachtiar Taebe



Wawancara dengan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Parepare Pak Minhajuddin, S.Ag,
M.Ag



Wawancara dengan Ketua KPU Kota Parepare Ibu Nur Nahdia



Wawancara dengan Ketua PANWASLU Kota Parepare Periode 2014, Pak Sainal Asnul S.IP



Wawancara Dengan Anggota Partai Golkar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP

KhaidirAlif, lahir di tanah sengkang 10 Agustus 1993, Anak kebanggaan pertama dari dua bersaudara dan merupakan buah cinta pasangan Bapak Rusli dan Hj Najmah Yanti. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar tahun 1999 di SD Negeri 16 Kota Parepare dan tamat pada tahun 2005

pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MtsN Model Kota Palopo dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama hingga tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan sekolah Menengah atas SMA Muhammadiyah Kota Parepare. dan pada akhirnya penulis bertekad untuk melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, jurusan Ilmu politik. Sejak duduk di pendidikan Perguruan tinggi penulis tertarik dan aktif dalam organisasi daerah Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare (IKMP) dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO). Dalam lingkup kampus, penulis juga aktif sebagai Anggota pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (Himapol).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R